

# Eksistensi Perempuan dalam Bidang Politik untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender

Vol 6 Issue 2  
(Oktober, 2022)

Aulia Ramdhani Arief<sup>1</sup>, Muhammad Firzah Riswanto<sup>2</sup>, Nuryanti Mustari<sup>3\*</sup>, Nur Khaerah<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: auliamrdhani55@gmail.com<sup>1</sup>, Muhamamd@gmail.com<sup>2</sup>, nuryantimustari@unismuh.ac.id<sup>3\*</sup>, nurkhaerah@unismuh.ac.id<sup>4</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: xxx  
Revised version received: xxx  
Accepted: xxx  
Available online: xxx

### Keywords:

Gender Equality; Women Existence; Capabilities;

### How to Cite:

APA Style 7th

## ABSTRACT

The purpose of this research is related to the strategy of the local government to build gender equality in the political field in Sinjai to determine the Strengthening the Existence of Women in the Political Sector to Achieve Gender Equality in Sinjai. The type of this research is qualitative research. This research uses descriptive research. The results of this study are to strengthening the existence of the women in political view to achieve gender equality in Sinjai, the implementation of this policies through Government Regulation number 12 of 2013 in concerning Gender Mainstreaming (PUG) which becomes the foundation and encouragement to be more gender responsive, and the capability in political already increasing, because there are no more gender discrimination in leadership because already depending on women's capacity and performance, and then the accessibility of the women to access politics has been given a lot of form from government and the legislative. Supporting factors in strengthening the existence of women are government support and community support. Then the inhibiting factor in strengthening the existence of women in the political field is the dissemination of information and the social patriarchal value.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>  
Copyright (c) 2022 by IJGCS



## 1. Pembahasan

Budaya patriarki tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan. Dominasi laki-laki atas perempuan telah menjadi realita sosial di berbagai negara. Budaya patriarki adalah sistem dimana perempuan dianggap sebagai "properti" dan laki-laki sebagai manusia (Charles dalam Susanto, 2015) Dalam hal ini, laki-laki menjadi subjek, dan perempuan sebagai objek yang diatur oleh laki-laki dalam kehidupan sosial dan budaya. Hal inilah yang membuat banyak perempuan berupaya untuk memperjuangkan derajat maupun hak mereka serta membebaskan mereka dari budaya tersebut, juga di kenal dengan kesetaraan gender sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikontruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, emosional cantik dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa.. Untuk memahami konsep gender maka dapat dibedakan antara kata gender dengan seks (jenis kelamin). Dipahami bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondidi dan budaya,

nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. (Sumule et al., 2019).

Terkait dengan keterlibatan perempuan dalam aspek politik perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sebab sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berperspektif gender (perempuan), sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sarannya. Maka dari itu telah di sahkan beberapa Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Untuk menindak lanjuti keseriusan pemerintah terhadap penangan keterwakilan perempuan dalam bidang politik pemerintah menerapkan bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU No.8/2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No 8/2012 pasal 55).Jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih (Wahyudi, 2019). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan PUG di Kabupaten Sinjai harus dilaksanakan melalui kebijakan yang responsif gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya Kabupaten Sinjai.

Implementasi Undang-Undang terkait kesetaraan gender maka keterwakilan perempuan di bidang politik dapat dilihat hasil pemulihan umum anggota DPR di Kabupaten Sinjai 2019-2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai akhirnya menetapkan 30 anggota DPRD Sinjai periode 2019-2024. Mereka merupakan legislator terpilih dari hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) dan 8 diantaranya adalah legilastor perempuan denganpersentase sebanyak 26,6%, angkaini hampir mencapai target 30%.

Fakta tersebut sedikit banyak menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi, dalam mewujudkan kesetaraan gender khususnya pada bidang politik. serta faktor yang menjadi tantangan salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap persoalan gender, terutama dari pengambil kebijakan dan masyarakat pada umumnya. Minimnya anggaran pemerintah yang dialokasikan menjadi salah satu indikasinya. Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai”. dengan tujuan untuk mengetahui Penguatan Eksistensi Perempuan serta factor penghambat dan factor pendukung Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai.

## 2. Metode

Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 bulan setelah seminar proposal dan lokasi penelitian bertempat di Kabuptaen Sinjai tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Membangun Kesetaraan Gender Pada Bidang Politik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, disajikan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penelitian dan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dengan masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis serta berhubungan antara fenomena yang di teliti. Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu: Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data

display), Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions). Keabsahan data menurut (Sugiyono, 2014), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut: Triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Keadaan Umum Kabupaten Sinjai

##### *Geografis*

Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2015 adalah sebesar 238.099 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,77 persen selama sepuluh tahun terakhir, terdiri dari 115.202 jiwa penduduk laki-laki dan 122.897 jiwa penduduk perempuan, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Kepadatan penduduk Kabupaten Sinjai adalah 290 jiwa per km<sup>2</sup> Kecamatan Sinjai Utara merupakan daerah yang memiliki kepadatan terbesar yaitu 1.561 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel. 1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten Sinjai Dirinci Tiap Kecamatan**

Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kel/Desa
		Km <sup>2</sup>	%	
<b>Sinjai Barat</b>	Manipi	135,53	16,53	9
<b>Sinjai Borong</b>	Pasir Putih	66,97	8,17	8
<b>Sinjai Selatan</b>	Bikeru	131,99	16,10	11
<b>Tellulimpoe</b>	Mannanti	147,30	17,96	11
<b>Sinjai Timur</b>	Mangarabombang	71,88	8,77	13
<b>Sinjai Tengah</b>	Lappadata	129,70	15,82	11
<b>Sinjai Utara</b>	Balagnipa	29,57	3,61	6
<b>Bulupoddo</b>	Bulupoddo	99,47	12,13	7
<b>P. Sembilan</b>	Kambuno	7,55	0,92	4

Sumber. Sinjai dalam angka tahun 2017

##### **Kondisi Politik Pemerintahan**

Pemerintahan Kabupaten Sinjai secara administrasi terdiri dari 9 kecamatan definitif. Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kantor Sekertaris daerah kabupaten Sinjai, pada tahun 2015 terdapat 67 desa definitif, 13 Kelurahan dan 354 Dusun/Lingkungan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk tenaga fungsional guru menurut Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai tercatat sebanyak 5.781 orang dengan rincian 2.552 laki-laki dan 3.229 perempuan.

**Tabel. 2 Daftar Partai Politik dan Perolehan Kursi di DPRD Kab. Sinjai 2019-2024**

Nama Parpol	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
GERINDRA	4	1	5
PKB	1	1	2
GOLKAR	4	-	4
PAN	2	1	3
PDIP	1	-	1
PKS	2	1	3
PPP	2	1	3
HANURA	1	1	2
DEMOKRAT	2	1	3
NASDEM	3	1	4
<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>30</b>

Sumber. Data DP3AP2KB 2019

### **Gambaran Umum DP3AP2KB**

Pada awalnya kedua instansi tersebut yaitu BPPKB merupakan Instansi vertikal dimana kewenangan pengelola Bidang Keluarga Berencana telah diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan Edaran Menteri pada Negeri No. 130/383/SJ Tanggal 20 Februari 2012, sedangkan Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan instansi pangkat daerah yang bernama Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat bermula Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.15 XE 2011 terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **Penguatan Eksistensi Perempuan dalam Bidang Politik di Kabupaten Sinjai**

Eksistensi perempuan hingga saat ini begitu penting, bukan hanya sekedar wacana kesetaraan gender, akan tetapi berdampak pada masa depan pembangunan suatu daerah atau negara. Sebab, perempuan adalah pondasi bangsa. Mereka yang memiliki peran besar untuk meneruskan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Tentunya dengan memberikan akses Pendidikan, memberikan peluang untuk berkiperah setara dengan laki-laki, dan memberikan ruang gerak serta support untuk melakukan hal-hal inovatif tanpa adanya diskriminasi masyarakat atas label perempuan, yang masih di anggap lemah.

### **Kebijakan**

Hal ini didukung dari hasil wawancara bersama Wakil Bupati Sinjai, A.K dan juga beliau seorang perempuan dan juga Wakil Bupati pertama perempuan di Kab. Sinjai. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa, respon Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap isu perempuan dan eksistensinya, menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan. Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menguatkan eksistensi perempuan, partai politik PPP juga memberikan program atau membuat kegiatan Pendidikan politik atau pengkaderan untuk memperkenalkan terkait perempuan dan politik.

### **Kapabilitas**

Penguatan kapabilitas juga berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan perempuan dan keterampilan memimpin, terkait pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor sudah tidak ada lagi. Semua di tempatkan sama sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki, dan tidak ada pemisahan jabatan khusus laki-laki dan perempuan. Hal

ini menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan dan kemampuan untuk memimpin sebagai seorang perempuan tidak diragukan lagi, karena dapat dilihat bahwa jabatan startegis di bagian pemerintahan tidak tersentralisasi oleh laki-laki, tapi berdasarkan kapabilitas yang dimiliki, dan saat ini perempuan sudah banyak mengambil peran penting.

**Tabel. 3 Data gender dinas P3AP2KB Jumlah Pekerja Di Lembaga Politik Kabupaten Sinjai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021.**

Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Staf Ahli Bupati	9	4
Kepala Kantor Camat	7	2
Inspektorat	6	1
Kepala Dinas	18	4
Bupati	1	0
Wakil Bupati	0	1
Anggota DPRD Kab/Kota	23	7
Perangkat Desa	125	28
Kepala Desa	50	2
<b>Jumlah</b>	<b>239</b>	<b>49</b>

Sumber: Website Struktur UPTD Kab. Sinjai

**Tabel. 4 Latar Belakang Pendidikan Struktur OPD di Kab. Sinjai**

Jenis Pekerjaan	Latar Belakang Pendidikan	
	Laki-Laki	Perempuan
Staf Ahli Bupati	S2	S2
Kepala Kantor Camat	S1	S2
Inspektorat	S2	S2
Kepala Dinas	S2	S2
Bupati	S2	-
Wakil Bupati	-	S2
Anggota DPRD Kab/Kota	S1	S1
Perangkat Desa	S1	S1
Kepala Desa	S1	S1

Sumber: Website Struktur UPTD Kab.Sinjai

Adapun latar belakang pendidikan para politisi dikabupaten sinjai, sebagian besar adalah S2 baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat kesamaan latar pendidikan anatara perempuan dan laki-laki mulai dari jenis pekerjaan Staf Ahli Bupati hingga kepala desa. Namun keterlibatan perempuan didalamnya juga menjadi sangat dominan karena dipengaruhi kapabilitas yang mumpuni untuk menduduki posisi yang sesuai di pemerintahan.

### Aksesibilitas

Seperti yang dijelaskan oleh direktur KOPEL (Komite Pemantau Legislative) Sinjai sebagai pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan juga pemantauan kinerja anggota DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah telah mendorong partisipasi perempuan untuk membuka jalan dan terlibat dalam politik serta memberikan ruang partisipasi perempuan untuk di pilih dan memilih.

**Tabel. 5 Representasi Perempuan dalam DPRD Kab. Sinjai**

Jabatan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Dapil 1	7	2
Dapil 2	8	0
Dapil 3	4	3
Dapil 4	5	1
Wakil Ketua Komisi	2	2
Sekretaris Komisi	1	1
Jumlah	27	9

Sumber: Data Gender DP3AP2KB

Dapat dilihat bahwa kesempatan dan aksesibilitas perempuan saat ini sudah semakin besar, karena jumlah persentase perempuan setiap dapil tidak terlalu jauh, hanya ada satu dapil yang tidak memiliki representasi perempuan, hal inilah yang perlu di tingkatkan lebih jauh lagi.

**Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penguatan Eksistensi  
*Dukungan Pemerintah dan Masyarakat***

Faktor pendukung menjadi salah satu unsur penting dalam menerapkan sebuah kebijakan atau tercapainya sebuah misi. Dalam penguatan eksistensi perempuan di bidang politik, beberapa informan menuturkan beberapa faktor pendukung yang mampu memberikan support.

Dukungan masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan wakil bupati, yang selalu turut serta dalam kegiatan-kegiatan seminar maupun pendidikan politik sebagai pemateri. Ketika masyarakat aktif terlibat kegiatan terkait edukasi politik akan hal ini akan berdampak positif oleh masyarakat itu sendiri karena akan selalu menambah pengetahuan dan menambah skill serta memahami kendala-kendala yang terjadi dilapangan dan mendiskusikan dalam seminar kelompok sehingga solusi yang di keluarkan nantinya akan sangat membantu perempuan.

**Faktor Penghambat  
*Penyebaran Informasi***

Sosialisasi dan pendekatan untuk memberikan pemahaman serta edukasi belum terlalu maksimal. Karena masih ada beberapa masyarakat yang belum terpapar informasi dengan jelas dan masih menganggap tabuh terkait kesetaraan gender sehingga berdampak pada aksesibilitas untuk berpolitik dan memahami terkait politik pada kesetaraan gender.

**Faktor nilai patriarki**

Pendapat inilah yang disebut patriarchy value masih kurangnya kepercayaan kepemimpinan oleh perempuan, karena system social sejak dahulu yang dipercaya bahwa laki-laki memegang kekuasaan utama dan mendominasi peran kepemimpinan politik, otoritas moral dan hak istimewa sosial. Maka dari itu masyarakat masih cenderung menaruh kepercayaan besar terhadap laki-laki. Jadi permasalahan terkait faktor penghambat dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu masih kurangnya sosialisasi secara terbuka dan persuasife masih adanya pemikiran bermasa bodoh untuk melek politik dan beberapa anggaran yang terpotong sehingga kurang maksimal dana yang didapatkan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah: Indikator yang menjadi penguatan eksistensi perempuan dalam bidang politik untuk mewujudkan kesetaraan gender di kabupaten Sinjai yaitu adanya implementasi kebijakan melalui PERDA nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi landasan dan dorongan untuk lebih responsif gender, kemudian kapabilitas dalam dunia politik sudah meningkat, karenatidak ada lagi perbedaan gender dalam memimpin tergantung dari kapasitas perempuan dan kinerja, serta aksesibilitas tentang politik telah banyak diberikan baik dari instansi pemerintah ataupun legislative.

Faktor pendukung dalam penguatan eksistensi perempuan yaitu dukungan kebijakan dan dukungan masyarakat. Kemudian faktor penghambat dalam penguatan eksistensi perempuan dalam bidang politik yaitu aksesibilitas informasi dan faktor patriarchy value.

#### Acknowledgment

Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing dan seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar atas selesainya artikel kami, karena selama ini telah menasehati, membantu dan mengajari penulis.

#### References

- Dwi Hani Febriyanti, A. K. (2013). Deskripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pendaftaran di TPPRJ RSUD Tugurejo Semarang Tahun 2003. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Huda, N., Rasyid, A. A., Suyata, P., & Sumarno, S. (2013). Pengembangan Model Penelitian Perspektif Gender. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 17(2), 304–317. <https://doi.org/10.21831/pep.v17i2.1702>
- Lestari, Y., Prastyawan, A., & Isbandono, P. (2019). *Formulasi strategi partisipasi partai politik dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan pada pemilu 2019*. 1(1), 52–61.
- Mandacan, M. W., Sabijono, H., & Runtu, T. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota Dprd Terhadap Pengawasan Keuangan (Apbd) Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 98–107. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20025.2018>
- Mifdal Zusron Alfaqi. (2015). Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2), 111. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5451/2120>
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257–270. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125>
- Nelli, J. (2015). Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 14(2), 254. <https://doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2629>
- Puspitawati, Harien. (2009). Analisis Gender Dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga. *Makalah Seminar Disampaikan Pada: Pelatihan Metodologi Studi Gender Kamis*, 13, 123–126.

- Puspitawati, Herien. (2013). Konsep, Teori dan Analisi Gender. *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*, 4(Zeitlin 1995), 1–16. <https://doi.org/10.1017/S0033583501003705>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Sumule, M. N., Kusuma, A. R., & Hasanah, N. (2019). *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Kabupaten Kutai Timur*. 7(1), 72–81.
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Muwazab*, 7(2), 120–130.
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>